

POLITIK ETIS PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PESANTREN

M. Syarif¹
gilangcempaka78@gmail.com

Abstract

This paper discusses about the influence of Dutch Colonial government policy in the framework of its Ethical Policy towards pesantren. The Ethical Policy carried out by the Dutch East Indies colonial government throughout the period of 1900 until the independence of Indonesia was accompanied by the issuance of a series of policies which were considered to be pressing and detrimental to Islamic education, especially pesantren in Indonesia, in the form of teacher ordinances, wild school ordinances, and the establishment of Dutch Schools which -since the beginning of the 20th century- the existence of these schools has a direct influence on the existence of Islamic Education, especially pesantren. The effect of this policies was the transfer of pesantren to the rural areas just to maintain their characteristics accompanied by their resistance to infiltration of foreign cultures presented by the Dutch through Western-style public schools and The birth of the madrasah as a response to demands for changes in the education system along with the widespread idea of Islamic reform throughout the 18th and 19th centuries.

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian. Pesantren telah hidup sejak 300 – 400 tahun yang lampau, menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat muslim. Dan dewasa ini diperkirakan menampung lebih satu juta santri. Pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan yang telah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Terutama di jaman kolonial, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat berjasa bagi umat Islam.²

Berbeda dengan sekolah modern yang terkemudian diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda melalui politik etisnya kepada rakyat bumiputera,

¹ Dosen Universitas Islam Majapahit Mojokerto

² Lihat, Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta, INIS, 1994), hal. 3

berdirinya pesantren di nusantara memiliki akar sejarah yang tertanam pada tradisi bangsa Indonesia sendiri. Pesantren tak memisahkan diri sebagai menara gading keilmuan sebagaimana terlihat pada fenomena pendidikan modern. Karena pesantren sepanjang perjalanan sejarah yang pernah dilaluinya mampu hidup menyatu dengan masyarakatnya, bahkan pesantren menjadi rujukan utama di bidang moral.

Dalam konteks ini, pesantren bukan hanya menjadi lembaga pendidikan semata-mata, menurut Hasan Muarif Ambary, bukti-bukti sejarah sosialisasi Islam di Nusantara memperlihatkan bahwa pesantren senantiasa memilih posisi sejarah yang tidak pernah netral. Sejak abad ke-16, pesantren telah menjadi dinamisator dalam setiap proses sejarah dan perjuangan bangsa.³ Harry J. Benda bahkan menyimpulkan bahwa sejarah Islam Indonesia adalah sejarah perluasan peradaban santri dan pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial, dan politik di Indonesia.⁴

Ini menunjukkan bagaimana pesantren selalu terlibat dalam setiap pergumulan sosial di Nusantara. Pesantren tak pernah melepaskan diri dari permasalahan yang terjadi disekitarnya. Bukan hanya bergumul dengan proses pendidikan, pesantren juga memberikan pengaruh terhadap upaya upaya perlawanan rakyat tatkala pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan yang tak populis dalam pandangan masyarakat nusantara.

Ketika politik etis diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan mendirikan lembaga pendidikan modern yang bersifat klasikal, pesantren otomatis mendapatkan kompetitor yang berat dalam bidang pendidikan. Jika sebelumnya pesantren adalah lembaga pendidikan yang menjadi rujukan penduduk bumiputera untuk mendidik anaknya, maka sejak keberadaan lembaga pendidikan Belanda pesantren menjadi lembaga pendidikan kelas dua. Seiring semaraknya sekolah-sekolah Belanda didirikan, -seperti akan kita lihat dalam pembahasan- betapa minat untuk belajar di pesantren tiba-tiba dikompertisikan dengan minat untuk

³ Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban : Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 318

⁴ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit : Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hal. 33

mendapatkan pekerjaan di kantor kantor Belanda setelah purna belajar –kendatipun hanya sebagai pegawai rendah- sebagaimana dijanjikan bagi lulusan sekolah Belanda.

Warna kesederhanaan yang khas dalam pendidikan pesantren lantas disaingi dengan suguhan pendidikan ala Barat yang menyajikan citra mewah ilmu pengetahuan modern yang dinilai lebih rasional dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, meskipun suguhan itu sesungguhnya berbungkus kepentingan untuk menegakkan wibawa dan kekuasaan pemerintah kolonial. Melalui usaha pengembangan sekolah-sekolah modern berbentuk klasikal, pemerintah kolonial Belanda menjalankan “politik asosiasi” sebagaimana dianjurkan oleh Snouck Hurgronje, antara lain melalui pelajaran sejarah Hindia-Belanda agar supremasi Belanda atas bangsa pribumi tercerminkan.⁵

Seegera keberadaan pendidikan pesantren mendapatkan tekanan lewat berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan Belanda dan lembaga pendidikannya. Pada saat Belanda melaksanakan politik etisnya di nusantara, Belanda memberlakukan peraturan-peraturan yang sangat berpihak seperti membelah bambu, satu sisi diinjak sedangkan sisi yang lain diangkat keatas.

Keberpihakan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda itu lebih banyak merugikan umat Islam dengan lembaga pendidikannya. Bagi Belanda, lembaga pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai tempat proses belajar mengajar, namun lebih jauh ia diawasi sebagai basis gerakan sosial yang dari rahimnya kerap lahir gerakan anti kolonial.

Tulisan ini memfokuskan kajiannya kepada politik etis yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda, kebijakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda sepanjang pelaksanaan politik etis serta pengaruhnya terhadap pesantren. Dala hal ini, pengaruh yang dimaksud adalah bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Belanda telah memicu reaksi kalangan pesantren baik untuk menolak maupun reaksi internal yang melahirkan perubahan pada struktur pesantren itu sendiri.

⁵ Lihat, Uka Tjandrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*. (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), hal. 267

B. Pemberlakuan Politik Etis

Adalah Van Deventer yang pertama kali menyampaikan gagasan tentang “hutang budi negeri Belanda kepada rakyat Bumiputera”.⁶ Di depan parlemen Belanda dia mengusulkan cara untuk membalas jasa kepada bangsa Indonesia yang banyak mengeluarkan tenaga demi bangsa Belanda. Van Deventer menegaskan bahwa negeri Belanda telah berhutang budi kepada bangsa Indonesia dan hutang budi itu harus dibayar. Gagasan tersebut menjadi benih bagi lahirnya politik etis yang juga disebut sebagai politik balas budi dengan tujuan utama untuk mengangkat taraf kehidupan rakyat bumiputera di Hindia Belanda.⁷

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (*eerschuld*) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis,⁸ yang terangkum dalam tiga program utama, yaitu :

1. Irigasi, yaitu program untuk memperbaiki pengairan pada lahan-lahan pertanian rakyat bumiputera dengan membangun bendungan dan jalur jalur pengairan.

⁶ C.Th. Van Deventer adalah seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama setahun. Pada 1899, ia menerbitkan sebuah artikel berjudul “*Een Eereschuld*” yang artinya “suatu hutang kehormatan” pada sebuah jurnal Belanda *de Gids*. Dia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia semua kekakayaan yang telah diperas dari mereka. Hutang ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia didalam kebijakan pemerintah kolonial. Pemberlakuan politik resmi dilaksanakan pada 1901 saat Ratu Wilhelmina mengumumkan penyelidikan tentang kesejahteraan di Jawa dan dengan demikian Politik Etis resmi diberlakukan. Pada 1902, Alexander W.F Idenburg menjadi diangkat sebagai Meneteri Urusan Daerah Jajahan. Dengan memegang jabatan ini ia melaksanakan pemikiran pemikiran politik etis. Pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip yang dianggap merupakan merupakan dasar bagi kebijakan baru tersebut. Yaitu : Pendidikan, Pengairan dan Perpindahan Penduduk. Lihat, M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200 – 2004*, (Jakarta, Serambi, 2005), hal, 320

⁷ Lihat, Wasty Sumanto & F.X Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983), hal, 46

⁸ Bandingkan dengan, Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984), hal, 51. Van Niel menegaskan bahwa “politik etis di Indonesia diberlakukan setelah Ratu Belanda berkata mengenai “kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat Hindia Belanda”. Berdasarkan pidato tersebut, berlakulah politik etis di Hindia Belanda.

2. Imigrasi, yaitu program untuk pemerataan penduduk dari pulau Jawa yang padat menuju daerah-daerah luar Jawa yang masih jarang penduduknya
3. Edukasi yakni program untuk meningkatkan taraf pendidikan rakyat bumiputera dengan pemerataan kesempatan belajar dan pendirian sekolah-sekolah rakyat.⁹

Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi bukan untuk mengairi lahan-lahan persawahan milik rakyat, melainkan untuk perkebunan-perkebunan Belanda sendiri. Sedangkan politik imigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan yang berada diluar Jawa untuk dijadikan pekerja rodi melalui sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*). Hanya program pendidikan yang memiliki manfaat penting bagi rakyat bumiputera kendatipun dalam pelaksanaannya, politik pendidikan ini dibarengi dengan sejumlah kebijakan non populis yang menimbulkan reaksi keras dari kalangan pendidikan Islam.

Pada aspek politik etis di bidang edukasi itu Belanda telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dan intelektual rakyat bumiputera. Pengaruhnya begitu penting dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah di Jawa. Dalam hal ini, keuntungan yang dirasakan oleh bangsa bumiputera adalah mereka mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bersekolah. Tercatat sampai pada tahun 1940 anak-anak bumiputera yang bersekolah di sekolah-sekolah rendah yang berbahasa daerah telah berjumlah 2 juta lebih dan disekolah-sekolah

⁹ Sesungguhnya, jauh sebelum politik etis diberlakukan, VOC juga telah mendirikan lembaga pendidikan terutama di luar Jawa. Tetapi lembaga pendidikan yang didirikan VOC ini tidak bisa meluas ke daerah lain di nusantara. Dan pada saat VOC mengalami kebangkrutan pada 1799, kekuasaan atas bumi nusantara diserahkan langsung ke tangan kerajaan Belanda. Pada saat itu pendidikan di Hindia Belanda (yang sekarang kita sebut Indonesia) belum berjalan dengan baik. Dan baru pada 1801 melalui Gubernur Jendral Daendels Belanda mau memperhatikan pendidikan bagi bangsa bumiputera. Itupun terbatas bagi anak-anak yang dipersamakan kedudukannya dengan anak-anak Belanda. Pada 1848 pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah rendah di Pasuruan dan Jepara. Tetapi pendirian sekolah ini bukanlah bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat bumiputera sebagaimana diinginkan dalam politik etis, melainkan untuk mendidik calon-calon pegawai rendahan di kantor-kantor pemerintah, Lihat, Sumanto, *Landasan*, hal, 38-39

Belanda tercatat sebanyak 88 ribu lebih.¹⁰ Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat yang selama ini hanya mengandalkan pendidikan tradisional semacam pesantren untuk beralih pada pendidikan modern yang ditawarkan oleh pemerintah penjajahnya. Pada saatnya nanti kecenderungan untuk menikmati pendidikan ala Barat di sekolah Belanda itu telah membawa kemajuan bagi bangsa bumiputera terutama terkait dengan lahirnya kelas intelektual baru yang memiliki cara berpikir modern namun dengan semangat nasionalisme yang tertanam kuat.

Di sisi lain, pelaksanaan politik etis juga telah menimbulkan reaksi antagonik terhadap keberadaan pendidikan tradisional nusantara. Ia telah memancing banyak reaksi keras terutama dari kalangan pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan pelaksanaan politik etis juga dibarengi dengan berbagai kebijakan yang kurang populis -sebagaimana akan kita bahas nanti- bagi keberadaan pendidikan Islam. Muatan kebijakan-kebijakan itu dinilai lebih banyak berpihak kepada kepentingan pemerintah kolonial daripada kepentingan rakyat bumiputera.

Dalam prakteknya, politik etis telah memunculkan banyak tafsir yang menunjukkan berbagai penyimpangan dari tujuannya semula ketika ia pertama kali dicanangkan. Bahkan menurut Elsbels Locher Scholten, Politik Etis telah menjadi “kebijakan yang bertujuan memperluas kekuasaan Belanda di seluruh wilayah Hindia Belanda menuju pemerintahan sendiri dibawah belanda menurut model Barat.”¹¹

Keinginan untuk membentuk model masyarakat barat melalui kebijakan pendidikan bagi rakyat bumiputera itulah yang -sebagaimana akan kita lihat-, membuat Belanda menerapkan kebijakan yang dualistis dalam kerangka politik etisnya dengan cara membeda-bedakan perlakuan antara lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda dengan lembaga pendidikan khas nusantara seperti pesantren.

B. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda

¹⁰ Lihat, Sumanto, *landasan*, hal. 41. Antusiasme masyarakat Bumiputra untuk masuk ke sekolah sekolah yang didirikan oleh Belanda ini tak lepas dari kebutuhan pragmatis bahwa lulusan-lulusan sekolah tersebutlah yang diakui oleh pemerintah Belanda dan secara otomatis bisa diterima bekerja sebagai pegawai pada kantor kantor administrasi dan perdagangan.

¹¹ Lihat, Elsbeth Locher Scholten, *Etika yang Berkeping-keping*, (Jakarta: Jambatan, 1996), hlm 270.

Tatkala program pendidikan dalam kerangka politik etis dilaksanakan, pemerintah kolonial Hindia Belanda sempat mempertimbangkan untuk memanfaatkan tradisi pendidikan rakyat yang sudah ada sebagai dasar dalam pengembangan pendidikan mereka dalam kerangka politik etisnya. Akan tetapi, gagasan ini secara teknis sulit dipenuhi karena tradisi pendidikan Islam waktu itu dipandang memiliki dasar ideologi Islam yang berbeda dari apa yang selama ini dibawa oleh Belanda sendiri bersama misi imperialismenya, yaitu misi Kristenisasi. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah Hindia Belanda, karena menyangkut persoalan ajaran Islam yang memang menjadi dasar pijakan pendidikan Islam; dan mustahil untuk dihilangkan dari kurikulumnya.¹²

Sejak awal pemerintah Hindia-Belanda memang sangat waspada terhadap gerakan Islam. Kekhawatiran mereka tentu bisa dipahami mengingat sejumlah pemberontakan pernah berlangsung di bawah bendera Islam. Sejak perang Diponegoro (1825-1830) dan seterusnya, kebijakan-kebijakan Belanda yang lebih ketat terhadap komunitas muslim diberlakukan. Itulah mengapa pemerintah Hindia-Belanda mewaspada kelompok Islam termasuk pendidikan Islamnya. Terbitnya resolusi yang bertanggal 18 Oktober 1825 bahwa setiap jamaah haji harus membayar pas jalan dengan f110, semenyara jamaah haji yang tidak memiliki pas-jalan akan dikenakan biaya f220. Bahkan pada 6 Juli 1859, penguasa kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi Haji.¹³

Dalam konteks ini, Islam dengan lembaga pendidikannya-, dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi pemerintah Hindia Belanda. Ancaman ini terutama ditujukan pada kebijakan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) dan keberlanjutan penjajahan mereka di Hindia Belanda sendiri. Snouck Hurgonje bersama dengan politik asosiasinya¹⁴ meyakini pendidikan Barat akan melunturkan

¹² Lihat, Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 2.

¹³ M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hal. 105

¹⁴ Lihat, H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 39. Politik asosiasi adalah sikap politik yang bertujuan mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan Negara penjajah melalui kebudayaan.

pengaruh Islam. Menurut Snouck Hurgonje, pendidikan Barat merupakan cara yang efektif untuk mengurangi dan menaklukan pengaruh Islam di Indonesia.¹⁵

Hal lain yang mencegah Belanda untuk mengkomodifikasi lembaga pendidikan Islam -seperti disinyalir oleh Alwi Shihab- adalah, disamping cita-cita untuk mensejahterakan rakyat pribumi, pemerintah Hindia Belanda juga mempunyai misi lain untuk menyebarkan Kristen di Hindia Belanda melalui politik etis. Berbagai subsidi untuk sekolah dan lembaga sebagai kepentingan menyebarkan misi tersebut diberikan secara besar-besaran.¹⁶

Pemerintah kolonial Hindia Belanda memilih bentuk persekolahan yang dikelolanya sendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan pribumi -khususnya pesantren- baik secara administrasi maupun sistemnya. Sekolah ala Belanda itu berbentuk sekolah modern dengan sistem klasikal yang bisa kita lihat hingga sekarang. Tetapi berbeda dengan sekolah Belanda sebelumnya, sekolah Belanda era Politik Etis didirikan lebih merata dan diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat sesuai dengan gagasan awalnya untuk membalas budi terhadap rakyat bumiputera.¹⁷

Dengan demikian, jika pada masa awal penjajahan Belanda, sekolah merupakan pendidikan yang eksklusif, maka pada awal abad ke-20 atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutsz, pendidikan mulai diselenggarakan bagi masyarakat luas dalam bentuk sekolah-sekolah desa.¹⁸ Pada masa inilah, rakyat

¹⁵ Menurut Robert Pringle, setelah pertengahan abad ke 19 barulah Belanda memandang Islam sebagai ancaman yang berkesinambungan lebih daripada sekedar memandang Islam sebagai agama para pemberontak. Dalam hal ini Belanda sendiri sebenarnya tak peduli pada klasifikasi Muslim- Kristen kecuali muncul pemberontakan dengan membawa panji Islam. Belanda adalah orang-orang Kristen Calvinis yang hanya peduli pada profit. Lihat, Robert Pringle, (2018), *Islam Ditengah Kebhinnekaan, Memahami Islam dan Politik di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2018), hal. 24.

¹⁶ Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung, Mizan, 1998), hal. 43-44

¹⁷ Lihat, catatan kaki nomor 8. Dalam keterangan Karel A. Steenbrink, pada dasawarsa terakhir abad ke 19 dimulailah pendidikan yang liberal. Pada masa itu, pendidikan kolonial juga diperuntukkan bagi sekelompok kecil orang Indonesia (terutama kelompok berada), sehingga semenjak tahun 1870 mulai tersebar jenis pendidikan rakyat, yang berarti juga bagi umat Islam Indonesia. Meskipun begitu satu perluasan pendidikan kepedesaan bagi seluruh lapisan masyarakat baru terlaksana pada permulaan abad ke 20 (tepatnya mulai 1901) oleh apa yang disebut sebagai "ethische politiek". Lihat, Steenbrink, *Pesantren*, hal. 23-24

¹⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta, Logos, 2000), hal, 98

bumiputera yang sebelumnya hanya memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah tradisional, mulai mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah pemerintah. Dan sebagai konsekwensinya didirikanlah sekolah di banyak tempat. Menurut Maksum, Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat, tidak saja menawarkan ongkos studi yang murah dan mata pelajaran yang praktis, tetapi juga menjanjikan pekerjaan meskipun hanya sebagai tenaga administrasi rendahan.¹⁹

Tetapi kebijakan pendirian sekolah modern ala Belanda tersebut bukannya tanpa tanggapan negatif dalam pandangan para tokoh pendidikan Islam. Dalam hal ini, Belanda dinilai lebih berpihak kepada sekolah-sekolah yang didirikannya tinimbang lembaga pendidikan tradisional yang lebih dulu ada di nusantara. Sebagaimana ditegaskan diatas, lulusan sekolah Belanda lebih dijamin untuk mendapat pekerjaan di kantor-kantor Belanda daripada mereka yang mendapat pendidikan dari lembaga pendidikan Islam semacam pesantren. Ditambah lagi sikap diskriminatif terhadap dualisme pendidikan ini bukan satu-satunya kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dirasa merugikan.

Untuk mendukung tujuannya, pemerintah Hindia Belanda bukan hanya menerapkan kebijakan standar ganda dengan lebih mengistimewakan sekolah umum miliknya daripada pendidikan pribumi. Pada 1905, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi Guru (*Goeroe Ordonantie*) dalam Stadsblaad 1905 No. 550 yang berisi kewajiban bagi setiap penyelenggara pendidikan Islam agar memperoleh izin tertulis dari bupati atau pejabat yang setara kedudukannya. Setiap guru juga diwajibkan membuat daftar murid-murid lengkap dengan segala keterangan yang harus dikirimkan secara periodik kepada pejabat yang bersangkutan.²⁰

Sejarah dari lahirnya kebijakan ordonansi guru tersebut berpangkal pada peristiwa pemberontakan petani di Banten pada 1888. Pada 1890, K.F Holle menyarankan agar pendidikan agama Islam diawasi karena pemberontakan para petani Banten tersebut ditengarai telah dimotori oleh para haji dan guru agama. Segera sesudahnya, di Jawa terjadilah perburuan terhadap para guru agama. Dan

¹⁹ Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 94

²⁰ Tjandrasasmita, *Arkeologi*, hal.269

demi penyeragaman dalam pengawasan guru tersebut, K.F Holle menyarankan agar para bupati melaporkan daftar guru didaeahnya setiap tahun. Kemudian, pada tahun 1904, seiring dengan pemberlakuan politik etis, Snouck Hurgronje mengusulkan agar pengawasan tersebut meliputi izin khusus dari bupati, daftar guru dan murid, dan bahwa pengawasan itu dilakukan oleh bupati dengan membentuk suatu panitia.

²¹ Setahun kemudian lahir lah ordonansi guru 1905.

Esensi Ordonansi Guru ini ditujukan untuk mengatur pelaksanaan pengawasan Belanda terhadap pembelajaran agama Islam di tanah Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Substansi dari Staatsblad nomor 550 tahun 1905 tersebut terdiri dari enam pasal, dan ringkasan terjemahannya adalah sebagai berikut:

- Pasal 1. Guru-guru agama dengan reputasi baik dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang akan mengajarkan agama Islam wajib mendapat ijin tertulis dari Patih atau Bupati.
- Pasal 2. Guru-guru agama wajib mendaftarkan para muridnya secara tertulis sesuai dengan ketentuan (blanko) pendaftaran yang telah ditetapkan Bupati; Murid-murid yang berasal dari luar daerah atau kediaman guru agama, ditetapkan Bupati dengan menyerahkan identitas yang bersangkutan.
- Pasal 3. Pengawasan guru agama dalam mengajar agama dilakukan oleh Patih atau Bupati; Kepada Patih dan Bupati, guru agama wajib memberi daftar mata pelajaran yang diajarkan, dan memberi ijin masuk keduanya (Patih dan Bupati) ke semua tempat pengajaran dan tempat tinggal murid;
- Pasal 4. Guru-guru agama yang mengajar tanpa ijin atau lalai dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dikenakan denda setinggi-tingginya 25 gulden, atau sanksi kurungan maksimal hari dengan kewajiban bekerja untuk negara

²¹ Suminto, *Politik*, hal. 52

tanpa upah; Bagi guru agama yang mengajarkan materi pelajaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, atau menggunakan nama palsu dalam menerima murid, dikenakan denda setinggi-tingginya 100 gulden, atau sanksi kurungan maksimal 30 hari dengan kerja paksa tanpa upah.

Pasal 5. Guru-guru agama harus tunduk pada peraturan ini. Pasal 6. Peraturan ini berlaku di Jawa dan Madura, kecuali pada daerah yang dikuasai Sultan, yakni Yogyakarta dan Surakarta.

Pasal 6. Peraturan ini berlaku di Jawa dan Madura, kecuali pada daerah yang dikuasai Sultan, yakni Yogyakarta dan Surakarta.²²

Berkenaan dengan Ordonansi Guru itu, Deliar Noer menjelaskan latar belakang dan tujuan diterbitkannya. Dia menyatakan sebagai berikut :

Salah satu cara yang dipergunakan oleh pihak Belanda untuk mengawasi Islam di Indonesia, terutama di Jawa, ialah peraturan yang dikeluarkan dalam tahun 1905 tentang pendidikan Islam. Peraturan tersebut mengharuskan izin tertulis dari bupati atau pejabat yang sama kedudukannya tentang pendidikan agama Islam. Izin ini mengemukakan secara terperinci sifat dari pendidikan itu. Tambahan lagi guru agama bersangkutan harus membuat daftar dari murid-muridnya menurut bentuk tertentu yang harus dikirimkan secara periodik kepada kepala daerah bersangkutan. Bupati atau pejabat yang sama kedudukannya hendaklah mengawasi dan mengecek apakah guru agama tersebut bertindak sesuai dengan izin yang diberikan. Pejabat ini juga harus mengawasi anak-anak murid dimaksud yang berasal dari luar daerah guru tadi.²³

²² Dikutip dari, Farid Setiawan, *Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah terhadap Ordonansi Guru*, dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III, No. 1, 2014, (Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 52-53

²³ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. (Jakarta: LP3ES. 1996), hal, 194
119

Ordonansi Guru 1905 dinilai oleh umat Islam sebagai perwujudan sikap diskriminatif pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan pribumi. Peraturan ini memang mudah dijalankan oleh sekolah yang memiliki organisasi yang rapi, tetapi tidak demikian halnya dengan guru-guru agama Islam. Mereka tidak menyelenggarakan administrasi yang rapi dalam mengatur sekolah/pengajian. Bahkan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren tidak menyelenggarakan administrasi seperti itu, tidak mencatat nama seluruh santri atau guru-guru yang mengajar di sana.²⁴

Kemunculan kebijakan itu menjadikan iklim penyelenggaraan pendidikan Islam pada akhir abad ke-19 hingga permulaan abad ke-20 dikontrol secara ketat. Mengapa demikian? Sebab, -menurut Alwi Shihab- pemerintah kolonial Belanda saat itu membaca bahwa membiarkan penyelenggaraan pendidikan Islam tanpa kontrol dapat menjadi ancaman bagi eksistensi mereka di tanah jajahan. Karena itulah, Ordonansi Guru dibuat untuk mengontrol lembaga pendidikan Islam yang dipandang pemerintah Belanda telah berperan sebagai sebuah ancaman potensial terhadap rezim mereka.²⁵

Lembaga pendidikan Islam yang menjadi sasaran Ordonansi Guru dan dianggap mengancam eksistensi pemerintah kolonial Belanda adalah pesantren yang dipimpin oleh seorang Kiai. Bagi Belanda, pesantren adalah sumber segala bentuk perlawanan masyarakat di Jawa. Perlu diakui bahwa pesantren pada pertengahan hingga akhir abad ke-19 memang telah memainkan peran signifikan bagi perlawanan masyarakat terhadap pemerintah Belanda. Di pesantren benih-benih anti kolonialisme ditabur dan dirawat dengan baik.²⁶

Para santri di pesantren dan masyarakat umum dididik agar memiliki sikap fanatisme yang tinggi, sehingga Belanda mereka anggap sebagai pemerintah kafir yang telah menjajah agama dan bangsa.²⁷ Karena itulah, Sartono Kartodirdjo

²⁴ Suminto,*Politik*, hal, 52

²⁵ Shihab, *Membendung*, hal. 147

²⁶ Menurut Ahmad Adaby Darban, doktrin-doktrin berbasis agama, seperti cinta tanah air, praktek jihad sebagai perang suci hingga gerakan amar ma'ruf nahi munkar dalam melawan penjajah disemai sedemikian subur di pesantren. Pelan tapi pasti, doktrin itu berhasil menanamkan fanatisme dan rasa benci guru agama (Kiai) serta para santrinya terhadap kekuasaan pemerintah Belanda. Lihat, Farid Setiawan, *Kebijakan*, hal. 50

²⁷ Suminto, *Politik*, hal. 50

menegaskan bahwa pertumbuhan pesantren yang sangat luar biasa telah berfungsi efektif sebagai tempat pendidikan serta gerakan kebangkitan Islam yang militan.²⁸

Anehnya, kendatipun terasa sangat menekan pendidikan Islam, reaksi-reaksi keras terhadap Ordonansi Guru 1905 relatif tak tampak. Umat Islam saat itu seperti membiarkan pemberlakuan kebijakan yang memasung guru agama itu. Atas fenomena ini, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan sikap diam umat Islam yang melingkungi pemberlakuan peraturan tersebut saat itu.²⁹

Dua puluh tahun sesudahnya, kebijakan itu disusul dengan kebijakan Ordonansi Guru kedua yang dikeluarkan pada 1925. Berbeda dengan yang pertama, ordonansi guru 1925 ini hanya mewajibkan para guru agama untuk melaporkan diri. Kendati begitu, sesungguhnya dua kebijakan itu memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu dijadikan media oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi dan mengontrol sepak terjang para pengajar dan penganjur agama Islam.

Berbeda dengan pemberlakuan ordonansi guru yang pertama, Ordansi Guru yang kedua ini menuai banyak protes. Banyak reaksi dilancarkan oleh kalangan pribumi terhadap ordonansi tersebut. Kongres Al Islam 1926 (1- 5 Desember) di Bogor³⁰ menolak cara pengawasan terhadap pendidikan agama ini. Kewajiban melapor kepada pemerintah Belanda itu oleh guru-guru agama Islam

²⁸ Lihat, Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya*, (Jakarta, Pustaka Jaya, 1984), hal. 215.

²⁹ Menurut Deliar Noer, respons umat Islam tidak dapat dimaknai sebagai sikap pasif mereka terhadap Ordonansi Guru. Mereka juga tidak bisa disebut telah memiliki kesadaran yang rendah, apalagi menyetujuinya, kendatipun pemberlakuan peraturan tersebut sepi dari protes. lihat, Noer, *Gerakan*, hal. 194. Sepertinya, kesadaran kritis untuk memberikan reaksi yang keras terhadap kebijakan itu belumlah mendapatkan mobilisator intelektual yang cukup kuat guna menyampaikannya kepada pemerintah Belanda pada saat itu.

³⁰ Kongres Al Islam disponsori oleh Sarekat Islam dan pertama kali diadakan di Cirebon dari 31 Oktober sampai 2 November 1922. Kongres ini dihadiri oleh utusan-utusan dari Muhammadiyah, Sarekat Islam, Al Irsyad, Perserikatan Ulama, Musyawaratul Ulama, Taswirul Afkaar, Jamiatul Khair, Syamail Huda, dan Nahdlatul Wathan. Dari kalangan tradisional, hadir Wahab Chasbullah dan KH Asnawi yang juga sekaligus mewakili kalangan pesantren. Kongres kongres selanjutnya digelar sembilan kali pada kota-kota yang berbeda. Pada tahun 1926, kongres Al Islam tersebut sampai dilaksanakan tiga kali pada tiga kota berbeda, yaitu Bandung, Surabaya, dan Bogor. Lihat, Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elite Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Bandung, Mizan, 2012), hal. 418. Wahab Hasbullah sendiri adalah tokoh pesantren yang sangat dikenal di wilayah Jawa Timur sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur dan telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional.

dinilai memberatkan karena lembaga pendidikan Islam pada umumnya -termasuk pesantren- tidak memiliki administrasi dan sarana yang memadai.³¹

Reaksi keras atas ordonansi tersebut bukan hanya datang dari penduduk bumiputera, tetapi juga dari pihak Belanda sendiri. Ch. O Van Der Plas pada 1934 berpendapat bahwa ordonansi tersebut tiada gunanya. Dia memandang bahwa demi penyederhanaan dan efisiensi, hendaknya pemerintah Hindia Belanda menghapuskan ordonansi guru yang dinilai hanya menghabiskan kertas ini. Pada akhirnya, ordonansi guru kehilangan urgensinya dan betapapun terpaksa menghilang dari peredaran.³²

Selain ordonansi guru, pemerintah kolonial juga mengeluarkan ordonansi lain yang bertujuan untuk mengawasi tumbuhnya sekolah-sekolah swasta di Hindia Belanda. (*Toezicht Ordonnantie Particulier Onderwijs*) lewat *Stadsblaad* 1932 No. 494 yang lebih populer dengan ordonansi sekolah liar (*Wilde Scholen Ordonnantie*). Ordonansi tersebut dikeluarkan pada 1932.³³ Disamping mengawasi pertumbuhan sekolah sekolah swasta, peraturan itu juga menetapkan bahwa para guru yang akan mengajar di sekolah swasta yang bersubsidi maka harus meminta izin kepada pegawai distrik setempat. Pelamar yang ingin mengajar di sekolah swasta harus alumni dari sekolah pemerintah atau sekolah swasta bersubsidi dan tidak akan mengganggu ketenangan dan ketertiban pemerintah kolonial. Ordonansi ini juga dimaksudkan untuk mencegah pengaruh politik pada sekolah-sekolah swasta yang disebut “sekolah liar” tersebut.³⁴ Selain itu, ordonansi tersebut juga memberikan kewenangan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk membubarkan

³¹ Suminto, *Politik*, hal. 52

³² *Ibid*, hal. 58, Menanggapi pelbagai usulan dihapuskannya ordonansi guru itu, Snouck Hurgronje dalam suratnya kepada menteri jajahan pada 1935 mengusulkan masih perlunya ordonansi tersebut dipertahankan dengan beberapa usulan perubahan. Tetapi situasi dan kondisi telah jauh berubah. Di pihak pemerintah colonial sendiri, situasi ekonomi moneter menuntut diadakannya penghematan dan penyederhanaan. Sedang di pihak pribumi, kekhawatiran munculnya pemberontakan dari kalangan Islam juga dirasa sudah tidak ada. Ini menjadi factor mengapa ordonansi guru pelan pelan kehilangan nilai fungsinya di mata pemerintah kolonial sendiri.

³³ Sejarah dikeluarkannya ordonansi sekolah liar tak dapat dilepaskan dari realitas dimana ordonansi guru dipandang sudah tidak efektif lagi mengingat Belanda harus melakukan openghematan anggaran, dan ordonansi guru selama pelaksanaannya memang telah menghabiskan banyak anggaran untuk mengawasi guru, murid, beserta materi pelajaran. Ordonansi guru itu kemudian secara pelan pelan digantikan dengan ordonansi yang lebih hemat anggaran berbentuk ordonansi sekolah liar.

³⁴ Putuhena, *Historiografi*, hal. 270

dan menutup madrasah / pesantren dan sekolah yang dianggap tidak memiliki izin penyelenggaraan, termasuk menutup sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak sejalan dengan kepentingan kolonial Belanda.³⁵

Kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda sepanjang periode politik etis tampak sekali bertendensi untuk menghambat laju pertumbuhan dan perkembangan pendidikan agama Islam di Nusantara, termasuk pesantren. Banyaknya kalangan bumiputera yang masuk ke sekolah-sekolah Belanda telah menghasilkan kelas intelektual baru yang orientasi pendidikannya berkiblat ke Barat dan terpisah dari kalangan pribumi berpendidikan tradisional yang lahir dari rahim pesantren. Bahkan secara politik, peran pemerintah Hindia Belanda dalam mengembangkan pendidikan untuk kaum bumiputera, terutama setelah diterapkannya kebijakan politik etis (*ethische politiek*), tidak hanya memecah umat Islam, tetapi juga menyingkirkan lembaga pendidikan pesantren yang tidak mau menerima subsidi dari pemerintah ke daerah pedalaman, sehingga pesantren tertutup dari perkembangan pendidikan modern.³⁶

Karena alasan politik pula, pemerintah kolonial Belanda memisahkan pendidikan Islam dari sistem pendidikan umum yang dikembangkan oleh mereka. Pemisahan sistem tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang ditengarai anti-Islam.³⁷ Di sisi lain, pemerintah kolonial Belanda melalui pengembangan sekolah-sekolahnya juga menjalankan politik asosiasi sebagaimana dianjurkan oleh Snouck Hurgonje, antara lain melalui pelajaran sejarah Hindia-Belanda dengan tujuan agar supremasi Belanda atas bangsa pribumi terceminkan.³⁸ Pelajaran sejarah bangsa asing seperti ini jelas bukan materi yang diinginkan dalam kerangka pendidikan rakyat bumiputera, apalagi bagi pesantren.

Selain praktek pemisahan pendidikan Islam dengan pendidikan umum itu, di lain pihak pemerintah kolonial Belanda juga masih setengah hati dalam

³⁵ Moh. Slamet Untung, *Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pesantren*, dalam Jurnal Forum Tarbiyah Vol. 11 No. 1 Juni 2013, (Pekalongan, STAIN Pekalongan), hal. 15

³⁶ Nur Huda, *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta, Ar Ruzz Media, 2007), hal. 386

³⁷ Steebrink, *Pesantren*, Hal, 6

³⁸ Tjandrasamita, *Arkeologi*, hal.

menjalankan misi politik etisnya. Gagasan pemerataan pendidikan untuk rakyat bumiputera tidak sepenuhnya dijalankan berdasarkan cita-cita yang luhur untuk membalas budi secara merata tanpa pandang bulu. Pada kenyataannya, pendidikan yang bagus tetap terbatas pada golongan atas. Untuk rakyat banyak pendidikan dikendalikan agar sedapat mungkin tetap rendah dan sederhana, hampir tanpa jalan keluar ke pendidikan lanjutan untuk mendapat kedudukan yang lebih baik.³⁹

C. Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Pesantren

Sebagaimana ditegaskan di atas, bahwa berdirinya sekolah-sekolah Belanda dalam rangka politik etis dengan didukung oleh perangkat kebijakan yang bersifat menekan pendidikan Islam tradisional telah membuat pesantren-pesantren menelusup jauh ke pedalaman sehingga terisolir dari perkembangan dunia luar.⁴⁰ Pemberlakuan kebijakan seperti Ordonansi Guru yang dinilai amat tidak mendidik dari bangsa Belanda yang menganggap dirinya “terdidik” kepada rakyat bumiputera berdampak negatif terhadap dunia pesantren. Banyak para kiai mengadakan “uzlah” (mengasingkan diri) ke desa-desa terpencil. Mereka memindahkan pesantren-pesantrennya ke tempat pemukimannya yang baru itu.⁴¹ Itulah sebabnya sampai sekarang, pesantren pada umumnya berada di desa-desa. Para kiai dan santri “mengisolir” diri, demi menjaga otentisitas tradisinya dari pengaruh kultur Barat yang dibawa Belanda dengan tetap menyimpan semangat antikolonialisme.

³⁹ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara. Bandung, Jenmars, 1987), hal. 20. Dalam karya klasiknya ini Nasution memetakan enam icir utama pendidikan era colonial, yaitu (1) Gradualisme, dimana Belanda sangat lambat dalam usaha-usaha untuk memajukan kesejahteraan bumiputera termasuk dalam bidang pendidikan. (2) Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan kontras yang tajam antara pendidikan Belanda dengan pendidikan pribumi (2) Kontrol sentral yang kuat dimana pemerintah memegang hampir segala aspek dalam pendidikan yang meminggirkan peran guru dan orangtua dalam politik pendidikan (4) Keterbatasan tukan untuk menghasilkan pegawai (5) Prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah pribumi disamakan dengan sekolah Belanda (6) Tidak adanya perencanaan yang sistematis untuk pendidikan pribumi. Nasution juga menegaskan bahwa pendidikan Belanda sangat berorientasi Barat. Hal ini tak mengherankan sebab menurut pandangan Snouck Hurgronje yang menjadi penasihat pemerintah kolonial saat itu, hanya pendidikan model Barat-lah yang bias menjauhkan masyarakat bumiputera dari Islam-nya yang sleama ini telah menjadi Rahim bagi gerakan gerakan anti kolonial Belanda.

⁴⁰ Lihat kembali catatan kaki nomor 32

⁴¹ Lihat, Kafrawi, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren sebagai Usaha Peningkatan Prestasi Kerja dan Pembinaan Kesatuan Bangsa*. (Jakarta: Cemara Indah, 1978), hal.34

Pergerakan ke pinggir ini bukannya sebuah proses evolutif yang tak disengaja. Reaksi pesantren untuk menarik diri ke pedalaman memang dikehendaki oleh pemerintah Hindia Belanda agar pusat-pusat wilayah pemukiman perkotaan dikuasai oleh sekolah-sekolah Belanda. Dan dengan begitu, posisi sekolah-sekolah Belanda tersebut berada pada sentra geografi yang strategis dan mudah dicapai.

Tetapi meskipun begitu, alih-alih jumlahnya semakin surut, penarikan diri pesantren ke pedalaman justru seperti menabur benih ke lahan murni yang masih subur. Pada saat inilah lahir pesantren-pesantren baru.⁴² Survai yang dilakukan oleh kantor *Shumubu* (Kantor Urusan Agama yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jawa 1942-1945) tahun 1942 memperlihatkan lebih jelas lagi valitas lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk tetap berkembang, meskipun pemerintah Belanda memperluas jumlah sekolah-sekolah tipe Eropa bagi penduduk golongan pribumi. Waktu itu tercatat 1.871 pesantren dan madrasah dengan jumlah satri/murid 139.415 orang.⁴³ Tapi jumlah ini diperkirakan terlalu kecil, karena banyak madrasah yang tidak mencantumkan jumlah muridnya.⁴⁴ Seperti yang telah kita baca mengenai ordonansi guru yang pertama, tatkala Belanda mewajibkan para Bupati agar meminta daftar murid dan guru pada masing-masing lembaga pendidikan pribumi, kewajiban ini sulit terpenuhi mengingat pesantren belum memiliki sistem administrasi modern yang dapat memenuhi tuntutan pemerintah Belanda tersebut disamping alasan-alasan “pemerintahan kafir” yang membuat kalangan pesantren berikap resisten terhadap tuntutan kebijakan mereka.

Segera setelah terdesak ke pedalaman, pesantren semakin terisolir dari perkembangan dunia luar. Dan lambat laun, peran penting pesantren sebagai

⁴² Sejak awal abad ke-20, pengembangan sekolah-sekolah pemerintah Hindia-Belanda yang bersifat diskriminatif itu mengalami tantangan dengan berkembangnya sekolah-sekolah swasta yang oleh pihak pemerintah Belanda disebut “*Wilde Scholen*” (sekolah liar). Tantangan-tantangan yang diberikan oleh penguasa-penguasa Belanda, antek-antek priyayinya, dan sekelompok intelektual Indonesia yang memperoleh pendidikan barat, menurut Benda, memberi pertumbuhan dan konsolidasi peradaban pesantren di Indonesia. Lihat, Benda, *Bulan Sabit*, hal, 33. Apa yang dimaksud oleh Benda tersebut sebagai konsolidasi, tampaknya mengarah pada penguatan pesantren dalam mempertahankan basis tradisinya dengan berlari ke pinggir sembari semakin banyak meregenerasi diri dalam hal jumlah.

⁴³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Sudi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta, LP3ES, 1982), hal 35-36

⁴⁴ Sudirman Tebba, *Dilema Pesantren, Belenggu Politik dan Perubahan Sosial*, dalam M. Dawam Raharjo, *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun Dari Bawah*, (Jakarta, P3M, 1985), hal, 272

dinamisator dan sentral pendidikan masyarakat pribumi mulai surut. Sementara di sisi lain, banyak anak-anak bumiputera yang lebih memilih untuk bersekolah pada sekolah-sekolah umum milik Belanda. Kondisi ini membuat kalangan pesantren mulai mendefinisikan ulang sistem pendidikan yang selama ini dipertahankannya.

Pada titik itulah benih bagi lahirnya sebuah lembaga pendidikan baru mulai disemai. Ia bernama Madrasah. Sebuah model sistem pendidikan klasikal dengan administrasi modern yang mengakomodir ilmu pengetahuan umum sembari tetap mempertahankan identitas keislamannya. Model pendidikan klasikal modern ala Islam ini kelak akan menjadi prototipe baru bagi sebuah lembaga pendidikan yang menggabungkan antara pengajaran disiplin-disiplin keilmuan khas pesantren dengan disiplin ilmu pengetahuan umum yang menjadi tuntutan masyarakat kekinian.⁴⁵

Perkembangan pesantren ke madrasah muncul pada awal abad 20, sebagai akibat dari perasaan kurang puas terhadap sistem pesantren yang terlalu sempit dan terbatas pada pengajaran ilmu *ilmu fard'ain*.⁴⁶ Tetapi lebih dari sekedar ketidakpuasan material tersebut ada faktor lain yang memicu hadirnya madrasah. Paling tidak terdapat dua hal, pertama adalah faktor pembaharuan Islam dan kedua respon terhadap politik pendidikan Hindia Belanda. Kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh sejumlah tokoh intelektual agama Islam dan kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam baik di Jawa, Sumatra maupun di Kalimantan.⁴⁷

⁴⁵ Suatu perubahan penting dalam sistem pengajaran pesantren dimulai ketika banyak putra Jawa yang menetap beberapa tahun di Mekkah dan Madinah untuk memperdalam pengetahuan Islam, dan kemudian memperkenalkan sistem madrasah setelah kembali ke tanah air pada awal abad 20. Ini dianggap sebagai jawaban positif oleh para kyai terhadap perubahan-perubahan akibat politik Belanda di Indonesia sejak akhir abad 19, disaat pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat bagi penduduk pribumi. Seperti pepatah gayung bersambut, disaat pendidikan Islam di tanah air mendapatkan tekanan hebat dari pemerintah kolonial Belanda, para terdidik tanah air yang belajar ke timur tengah membawakan gagasan-gagasan pembaharuan Islam tatkala mereka pulang untuk menyelamatkan sistem pendidikan tradisional dari kondisinya yang teralienasi ditengah masyarakat saat itu. Selama di Timur Tengah sepertinya mereka bersinggungan erat dengan gagasan-gagasan pembaharuan yang membahana keseluruhan dunia Islam pada abad ke 19. Lihat, Tebba, *Dilema*, hal, 272

⁴⁶ Lihat, Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), hal, 80

⁴⁷ Ibid, hal, 88

Sedangkan disisi lain, madrasah lahir sebagai respon atas kebijakan dan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu yang telah membuka lebih luas kesempatan pendidikan bagi penduduk pribumi, yang semula hanya terbatas pada kaum bangsawan. Disamping disamping dimaksudkan sebagai etika balas budi Belanda terhadap rakyat bumiputera, juga merupakan salah satu usaha pemerintah Hindia Belanda untuk menundukkan masyarakat pribumi melalui jalur pendidikan.⁴⁸

Sebagai lembaga pendidikan yang dilahirkan oleh pesantren, madrasah memiliki kesamaan visi atau bahkan merupakan kesinambungan dari pesantren. Sistem madrasah yang diperkenalkan oleh pesantren adalah menitiktekan pada keilmuan agama Islam, disamping pengetahuan umum yang dapat meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan. Kehadiran madrasah ini diperkuat lagi dengan sikap non-kooperatif para pendirinya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Lembaga ini sengaja tidak menelorkan anak didik sebagai tenaga kerja dan birokrat kolonial. Kegiatan pendidikan yang diciptakan pesantren dan madrasah tidak di proyeksikan pada "orientasi lapangan kerja".⁴⁹

.Dengan sistem madrasah, pesantren mencapai kemajuan penting, yaitu keberhasilan para kyai mengkonsolidasikan kedudukan pesantren dalam menghadapi perkembangan sekolah-sekolah Belanda. Pada tahun 1920 -1930an, jumlah pesantren besar beserta para santrinya melonjak berlipat ganda. Sebelum dasawarsa 1920an, masing-masing pesantren mempunyai sekitar 200 santri, tapi permulaan tahun 1930an, banyak pesantren – seperti pesantren Tebuireng di Jawa Timur – mempunyai santri lebih dari 1500 orang.⁵⁰

Madrasah di pesantren meliputi Ibtidiyah, sederajat dengan Sekolah Dasar dengan lama belajar 6 tahun, Tsanawiyah, setingkat Sekolah Menengah

⁴⁸ Fatah Syukur, *Madrasah di Indonesia, Dinamika, Kontinuitas, dan Problematika*, dalam Ismail SM, dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Jagakarta, Pustaka Pelajar, 2002), hal.241

⁴⁹ Pada era ini, label santri bahkan menjadi simbol prestis sosial yang tersemat pada diri seorang terpelajar. Seorang santri dipandang memiliki dua arus keilmuan sekaligus, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Bagaimana kelompok santri selalu dipersuasi dan didekati oleh elite politik menjelang momen-momen suksesi nasional membuktikan bagaimana pesantren beserta segenap eksponennya bukan lagi memiliki posisi pinggiran.

⁵⁰ Lihat, Tebba, *Dilema*, hal. 271

Pertama dengan masa belajar 3 tahun, dan Aliyah yang sederajat Sekolah Menengah Atas dengan lama belajar sama dengan Tsanawiyah/SMP. Dewasa ini dengan selain tetap melanjutkan tradisi pengajian kitab klasik, pesantren juga telah menyempurnakan kurikulum madrasah nya dengan menambah sejumlah pelajaran non agama. Bahkan beberapa pesantren besar mendirikan sekolah-sekolah umum dan lingkungannya, terutama SMP dan SMA. Kecenderungan ini -kelak ketika Indonesia merdeka dan pemerintah Indonesia mengatur sendiri kebijakan pendidikannya- erat berkaitan dengan perubahan madrasah yang di lancarkan oleh Departemen Agama dan berkembangnya sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta diluar pesantren.

D. Penutup

Sepanjang pelaksanaan politik etis, pemerintah kolonial Belanda telah memberlakukan kebijakan-kebijakan yang sangat menekan terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Dalam hal ini, yang paling merasakan dampak dari kebijakan tersebut adalah pesantren. Karena sebagaimana diketahui pesantren lembaga pendidikan tradisional yang menjadi sentral pendidikan masyarakat pribumi saat itu.

Tetapi alih-alih tenggelam dan menghilang sebagaimana dikehendaki oleh Belanda, pesantren justru mampu mengonsolidasi dirinya melewati berbagai tantangan hingga habis masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dan sembari secara bertahap menata diri, pesantren memodernisir lembaga pendidikannya. Hasil dari pergulatan dengan sekian banyak tantangan itu adalah keberadaan pesantren yang semakin banyak dan merata serta lahirnya madrasah sebagai anak kandung pesantren yang membawa citra modern dalam sistem pendidikannya.

Sepanjang beberapa dekade terakhir, pesantren bukan hanya memiliki madrasah dalam lembaga pendidikannya. Pesantren kini semakin bervariasi dalam memajukan pendidikannya ketika mereka bereaksi terhadap perubahan situasi dan kondisi social budaya, pergeserean doktrin Islam dan tuntutan modernitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambary , Hasan Muarif, (2001), *Menemukan Peradaban : Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. (Jakarta, Logos Wacana Ilmu)
- Azra, Azyumardi, (2000) *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu)
- Benda, Harry J. (1985), *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam : Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. (Jakarta: Pustaka Jaya)
- Burhanuddin, Jajat, *Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elite Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Bandung, Mizan, 2012)
- Dhofier , Zamakhsyari, (1982), *Tradisi Pesantren, Sudi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta, LP3ES)
- Djumhur, I & H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung, CV Ilmu, 1976)
- Fatah Syukur, Fatah, (2002), *Madrasah di Indonesia, Dinamika, Kontinuitas, dan Problematika*, dalam Ismail SM, dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar)
- Feisal , Yusuf Amir, (1995), *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press)

- Gunawan Ary H.(1986), *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara)
- Haedari , HM. Amin, dkk, (2005), *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas*, (Jakarta, IRD Press)
- Huda, Nur, (2007), *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta, Ar Ruzz Media)
- Ibrahim, Ahmad dkk. (1989), *Islam Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*, (Jakarta: LP3ES)
- Ismail SM, dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Jagakarta, Pustaka Pelajar, 2002)
- Kafrawi, (1987), *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren sebagai Usaha Peningkatan Prestasi Kerja dan Pembinaan Kesatuan Bangsa*. (Jakarta: Cemara Indah)
- Maksum, (1999), *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu)
- Mastuhu, (2001), *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta, INIS, 1994)
- Misdar, Muhammad, (2017), *Sejarah Pendidikan dalam Islam*, (Jakarta, Rajawali Press)
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah*, (Bandung, Rosda)
- Nasution, S, (1987) *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung, Jenmars)
- Noer, Deliar, (1996), *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. (Jakarta: LP3ES)
- Pringle, Robert, (2018), *Islam Ditengah Kebhinnekaan, Memahami Islam dan Politik di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media)
- Putuhena, M. Shaleh, (2007) *Historiografi Haji Indonesia*,(Yogyakarta: LkiS)
- Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern, 1200 – 2004*, (Jakarta, Serambi)
- Santoso, Salmat Iman, (1987) *Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta, C.V Haji Masagung)
- Sartono Kartodirdjo, (1984), *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya*, (Jakarta, Pustaka Jaya)
- Scholten , Elsbeth Locher, (1996), *Etika yang Berkeping-keping*, (Jakarta: Jambatan)
- Setiawan, Farid, (2014) *Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah terhadap Ordonansi Guru*, dalam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. III, No. 1, 2014, (Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga)
- Shihab , Alwi, (1998), *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung, Mizan)
- Steenbrik, Karel. A., (1984), *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad 19*, (Jakarta, Bulan Bintang)

- Steenbrink ,Karel A. (1994), *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES)
- Sumanto, Wasty & F.X Soeyarno,(1983), *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, (Surabaya, Usaha Nasional)
- Suminto, H. Aqib, (1985), *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES)
- Tebba, Sudirman, *Dilema Pesantren, Belenggu Politik dan Perubahan Sosial*, dalam M. Dawam Raharjo (Ed.), (1985), *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun Dari Bawah*, (Jakarta, P3M)
- Tjandrasasmita, Uka, (2009), *Arkeologi Islam Nusantara*,. (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia)
- Van Niel, Robert, (1984), *Munculnya Elit Modern Indonesia*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya)
- Yamin, Muhammad, (2013), *Ideologi dan Kebijakan Pendidikan*, (Malang, Madani)
- Yunus, H, Mahmud, (1982), *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Mutiara Sumber Widya)
- Ziemek, Manfred, (1986), *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta, P3M).